

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DALAM RANGKA PENINGKATAN RUMAH LAYAK HUNI DI DESA GUNUNGMASIGIT KABUPATEN BANDUNG BARAT

Devi Nurjanah¹, Diah Pudjiastuti²

Prodi Ilmu Politik, Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional

Email: devinurjanah929@gmail.com

ABSTRAK

Rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan sosial, kesehatan, serta kualitas hidup masyarakat. Namun, di Desa Gunungmasigit Kabupaten Bandung Barat masih banyak keluarga berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan daya beli dan kondisi ekonomi yang rendah. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperbaiki atau membangun rumah secara swadaya dengan dukungan dana stimulan serta pendampingan teknis dari tenaga fasilitator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program BSPS di Desa Gunungmasigit, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan agar program berjalan lebih efektif. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, yaitu melalui verifikasi data calon penerima, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), pemberian pendampingan, hingga pelaksanaan pembangunan rumah berbasis gotong royong. Program ini terbukti mampu meningkatkan kualitas fisik hunian sekaligus memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Kendati demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan dana stimulan yang belum mencukupi seluruh biaya pembangunan, rendahnya pemahaman sebagian warga mengenai mekanisme program, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal. Kesimpulannya, BSPS telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni di Desa Gunungmasigit, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sosialisasi, peningkatan intensitas pendampingan, serta harmonisasi koordinasi lintas lembaga agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BSPS, Rumah Layak Huni, Desa Gunungmasigit

ABSTRACT

Decent housing is a fundamental need that is closely linked to social welfare, health, and the overall quality of life of the community. However, in Gunungmasigit Village, West Bandung Regency, many low-income families still live in inadequate housing due to limited purchasing power and poor economic conditions. To address this issue, the government through the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) implemented the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS). This program is designed to facilitate communities in repairing or constructing houses independently, supported by stimulant funds and technical assistance from facilitators. This study aims to analyze the implementation of BSPS in Gunungmasigit Village, identify the challenges encountered, and formulate improvement strategies to enhance program effectiveness. The research employed a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The findings indicate that the program implementation has generally followed the prescribed procedures, including verification of beneficiaries, formation of Community Self-

Help Groups (KSM), technical assistance, and community-based construction through mutual cooperation. The program has successfully improved housing quality and strengthened social solidarity among residents. Nevertheless, the implementation still faces several obstacles, such as limited stimulant funds that are insufficient to cover all construction costs, the community's lack of understanding regarding program mechanisms, and suboptimal coordination among stakeholders. In conclusion, BSPS has made a significant contribution to improving decent housing in Gunungmasigit Village, although its effectiveness still requires enhancement. Therefore, this research recommends strengthening socialization, increasing the intensity of technical assistance, and improving inter-agency coordination to ensure the program is more targeted, sustainable, and beneficial for the community in the long term.

Keywords: Policy Implementation, BSPS, Decent Housing, Gunungmasigit Village

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat delapan dimensi utama yang dijadikan acuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, yaitu aspek kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola dan tingkat konsumsi, perumahan dan lingkungan, penanggulangan kemiskinan, serta bidang sosial lainnya.¹

Pada dasarnya perumahan dan lingkungan merupakan konteks kesejahteraan sosial, dan perumahan tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai kebutuhan primer yang muncul setelah terpenuhinya kebutuhan pokok lain seperti pangan dan sandang. Kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh setiap individu untuk mempertahankan hidup dan kesejahteraannya. Karena itu rumah memegang peran penting untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi setiap individu. Setiap individu berhak memiliki kehidupan yang layak, termasuk dalam hal memperoleh tempat tinggal, tidak salah jika hak akan rumah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia secara global.²

Pemenuhan kebutuhan akan perumahan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, melainkan juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang penting. Keberadaan rumah layak huni menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat, karena dari lingkungan tempat tinggal yang aman dan sehat akan tercipta kualitas hidup yang lebih baik. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menghadirkan kebijakan serta program yang terarah untuk memastikan setiap warga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat memperoleh hunian yang layak. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan rumah tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan individu, melainkan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan secara adil dan merata. Hal ini menegaskan bahwa hak atas perumahan merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada setiap warga negara. Karenanya, negara harus hadir sebagai penjamin agar akses terhadap hunian layak dapat dinikmati secara merata tanpa diskriminasi. Lebih jauh, penyediaan hunian yang layak juga merupakan fondasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 28 H ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia pada ayat "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*".³ dalam Pasal 28H ayat 1 ini menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari sisi ekonomi, melainkan juga mencakup hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang memadai, serta lingkungan yang sehat dan layak huni. Aturan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak fundamental setiap warga negara, agar mereka dapat menikmati kehidupan yang pantas dan bermartabat dalam tatanan sosial yang adil dan seimbang.

Ketidakmampuan untuk mendapatkan rumah layak huni dapat menyebabkan keterlantaran. Karena keterbatasan daya beli dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, banyak masyarakat, terutama yang kurang mampu, masih kesulitan memenuhi kebutuhan ini. Akibatnya, pemerintah harus memberikan dukungan penuh untuk menyediakan tempat tinggal yang layak.

Keterbatasan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan nasional. Banyak keluarga di Indonesia yang masih tinggal pada hunian yang belum memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek keamanan, kesehatan, maupun kenyamanan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas tempat tinggalnya secara swadaya.

Dilihat dari sudut pandang filosofis, program ini merepresentasikan komitmen terhadap nilai keadilan sosial, distribusi kesejahteraan yang merata, serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Hunian tidak hanya dipandang sebagai tempat tinggal secara fisik, melainkan juga sebagai ruang berkembangnya nilai-nilai kemanusiaan, budaya, dan interaksi sosial yang menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan beradab. Dengan begitu, keterlibatan negara dalam menjamin kelayakan tempat tinggal bagi setiap warganya merupakan bentuk nyata dari kewajiban negara dalam menegakkan dan melindungi hak-hak asasi mereka sebagai manusia.

Program ini juga mencerminkan peran komitmen negara dalam memastikan terpenuhinya hak dasar setiap warga negara untuk memiliki hunian yang sesuai standar. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap individu berhak hidup sejahtera secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta menikmati lingkungan hidup yang baik.⁴

Dilihat dari aspek yuridis, kebijakan ini memiliki legitimasi hukum yang kokoh, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas hunian yang layak, yang mencakup aspek kesehatan, keamanan, keserasian, serta keteraturan lingkungan. Ketentuan tersebut menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan pembangunan sektor perumahan, serta mempertegas tanggung jawab negara dalam memastikan tersedianya akses yang adil dan merata terhadap perumahan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, regulasi ini mewajibkan pemerintah untuk mengambil peran aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan stimulan perumahan, sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong masyarakat melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumahnya secara swadaya. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional, yang mengatur secara konkret peran serta negara dalam penyediaan hunian layak sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginisiasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak. Program ini bertujuan mendorong masyarakat untuk membangun atau memperbaiki rumah secara mandiri dengan dukungan dana stimulan serta pendampingan teknis. Landasan hukum pelaksanaan program tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Regulasi ini menetapkan prosedur, mekanisme, serta standar pelaksanaan bantuan agar lebih efisien dan efektif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Indonesia.

Dilihat secara sosiologis, lahirnya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak terlepas dari kebutuhan riil masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah (MBR), terhadap hunian yang layak sebagai bagian penting dari kehidupan sosial yang sehat dan bermartabat. Rumah tidak hanya berperan sebagai tempat berlindung secara fisik, melainkan juga sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya proses internalisasi nilai, pembentukan norma, interaksi antar anggota keluarga, serta identitas komunitas. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap hunian layak berpotensi menimbulkan berbagai problem sosial seperti kemiskinan yang sistemik, keterpinggiran sosial, kesenjangan antarkelompok, hingga persoalan

kesehatan masyarakat.

Program BPSPS hadir sebagai upaya untuk merespons persoalan tersebut melalui pendekatan berbasis pemberdayaan. Bantuan stimulan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya bersifat material, tetapi juga bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya dan bergotong royong. Dalam prosesnya, program ini turut memperkuat nilai solidaritas sosial di lingkungan tempat tinggal. Pendekatan ini selaras dengan perspektif sosiologi pembangunan yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif, sehingga hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan aktual dan berkelanjutan.

Dengan demikian, BPSPS tidak hanya menjadi solusi praktis dalam penyediaan perumahan, tetapi juga memainkan peran penting sebagai alat transformasi sosial yang mendorong peningkatan kesejahteraan, memperkuat jaringan sosial masyarakat, serta mengurangi ketimpangan sosial yang ada.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah secara fisik, tetapi juga mendorong orang untuk menjadi bagian dari masyarakat, mendukung tenaga kerja lokal, dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar mereka. Meskipun konsep program ini sangat ideal, pelaksanaannya di lapangan sering menghadapi masalah seperti masyarakat yang tidak memahami program, kekurangan sumber daya, dan koordinasi yang buruk antar pihak.

Dalam situasi ini, analisis penerapan Program BPSPS sangat penting untuk mengetahui seberapa efektif, efisien, dan berdampak pada peningkatan jumlah rumah layak huni. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang pelaksanaan program di tingkat lokal dan memberikan saran untuk perbaikan di masa mendatang.

Di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan Program BPSPS tersebut guna meningkatkan kualitas rumah layak huni. Desa Gunungmasigit adalah salah satu dari Kecamatan Cipatat yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat berpenghasilan rendah. Pada periode 2024 sudah banyak Masyarakat yang sudah mendapatkan program bantuan ini. Program ini dimulai sekitar tahun 2020 dimulai dari pemerintah Desa yang mendapat rekomendasi atau usulan dari para rukun warga (RW) selanjutnya pihak Desa anak mengusulkan nama-nama calon yang sudah direkomendasikan ke pihak Kabupaten atau Provinsi. Nama usulan calon penerima bantuan akan diseleksi sesuai ketentuan yang ada pada pedoman pelaksanaan program. Pemerintah Desa kemudian akan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang akan membantu dalam pelaksanaan program bantuan ini agar mempermudah koordinasi pelaksanaan program.

Pada tahun 2021 data penerima baru turun tapi tidak semua yang diajukan mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya, hanya sekitar 32 rumah yang mendapatkan bantuan dari dana Provinsi. Dilihat dari tabel diatas penerima bantuan stimulan perumahan swadaya pada tahun 2021 itu sekitar 32 rumah dan mendapatkan dana sebesar 18.000.000 juta untuk satu rumah yang berasal dari dana provinsi.

Kebutuhan akan rumah layak huni merupakan hak fundamental yang harus dipenuhi setiap individu, karena rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal secara fisik, tetapi juga sebagai ruang yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan keluarga dalam suasana aman, nyaman, sehat, dan bermartabat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas hunian layak merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kebutuhan terhadap rumah layak huni juga memiliki kontribusi penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada tujuan ke-11, yaitu "*Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan*". Program ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap orang, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap perumahan yang aman, terjangkau, layak, dan inklusif. Tanpa

rumah yang layak, masyarakat akan lebih rentan terhadap kemiskinan, penurunan kesehatan, penurunan produktivitas, serta kesulitan dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak mereka.

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada beberapa tahun terakhir, masih terdapat jutaan rumah di Indonesia yang dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan rumah layak huni masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan RTLH yang umum ditemukan di lapangan meliputi:

1. Konstruksi rumah yang tidak kokoh sehingga berisiko roboh saat hujan deras atau bencana gempa.
2. Ventilasi dan pencahayaan yang tidak memenuhi standar kesehatan sehingga menimbulkan penyakit pernapasan dan kulit.
3. Sanitasi yang buruk akibat lantai masih berupa tanah, tidak memiliki kamar mandi yang memadai, atau tidak tersambung dengan sistem pembuangan air limbah yang sehat.

Salah satu desa yang menghadapi tantangan tersebut adalah Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Mayoritas penduduk di desa ini bekerja di sektor informal seperti buruh tani, buruh harian lepas, dan pedagang kecil dengan pendapatan yang relatif rendah dan tidak menentu. Kondisi ekonomi tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan untuk melakukan perbaikan rumah secara mandiri tanpa bantuan dari pihak luar. Padahal, rumah yang tidak layak huni berpotensi menimbulkan dampak multidimensional, di antaranya:

1. Dampak Kesehatan. Kondisi rumah yang lembab, tidak memiliki ventilasi cukup, dan sanitasi buruk meningkatkan risiko penyakit seperti ISPA, diare, serta penyakit kulit pada anak-anak dan lansia.
2. Dampak Psikologis dan Pendidikan. Anak-anak yang tinggal di rumah sempit dan gelap cenderung kesulitan belajar, kehilangan rasa percaya diri, serta memiliki tingkat stres tinggi akibat ketidaknyamanan lingkungan rumah.
3. Dampak Sosial dan Ekonomi. Rumah yang tidak layak membuat keluarga tidak memiliki tempat usaha rumahan yang memadai, sulit menampung tamu, serta menimbulkan stigma negatif dari lingkungan sekitar, sehingga berpengaruh pada interaksi sosial.

Sebagai upaya menjawab permasalahan keterbatasan rumah layak huni, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengimplementasikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini dirancang sebagai bentuk fasilitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam membangun maupun memperbaiki tempat tinggal agar sesuai dengan standar kelayakan hunian. Esensi utama dari BSPS terletak pada prinsip pemberdayaan, di mana bantuan yang diberikan bersifat stimulan atau pemicu agar masyarakat terdorong untuk melaksanakan pembangunan secara swadaya dan bergotong royong, dengan tetap menekankan partisipasi aktif penerima manfaat.

Program BSPS memiliki tujuan strategis, antara lain:

1. Membantu masyarakat memperbaiki atau membangun rumah layak huni dengan dana stimulan.
2. Mendorong tumbuhnya kemandirian dan swadaya masyarakat dalam pembangunan perumahan.
3. Memperkuat nilai gotong-royong dan kepedulian sosial antar warga di lingkungan sekitar.
4. Mengurangi jumlah RTLH dan mendukung target pengurangan kemiskinan ekstrem.

Namun, implementasi program ini di Desa Gunungmasigit masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan pemerintah desa dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), beberapa masalah yang muncul di antaranya:

1. Kurangnya pemahaman teknis masyarakat terhadap prosedur program BSPS, mulai dari pengajuan dokumen, penggunaan dana stimulan, hingga pelaporan pembangunan rumah.
2. Terbatasnya jumlah dana stimulan yang diberikan per rumah (sekitar Rp15 juta - Rp18 juta) sehingga tidak dapat menutupi seluruh biaya pembangunan rumah secara utuh. Penerima bantuan masih harus menambah dana pribadi atau berutang untuk menyelesaikan rumah mereka.

3. Koordinasi dan komunikasi antar pelaksana program seperti pemerintah desa, KSM yang belum optimal, menyebabkan penyaluran bantuan terkadang terlambat atau terjadi kesalahpahaman teknis di lapangan.
4. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam proses pembangunan rumah, terutama dalam kontribusi tenaga kerja gotong-royong, karena kesibukan ekonomi harian mereka.

Melihat kompleksitas tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi implementasi Program BSPS, sekaligus menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi riil program, menyumbangkan pengetahuan ilmiah dalam bidang implementasi kebijakan publik, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan program di masa mendatang, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun nasional.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Gunungmasigit ini masih ada permasalahan yang harus dibenahi. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan penanggung jawab program ini yaitu pihak Desa dan kelompok swadaya Masyarakat (KSM), bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

2. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana impementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka peningkatan rumah layak huni di Desa Gunungmasigit Kabupaten Bandung Barat ?
- 2) Apa kendala-kendala dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka peningkatan rumah layak huni di Desa Gunungmasigit Kabupaten Bandung Barat ?
- 3) Bagaimana upaya yang telah dilakukan mengatasi kendala-kedala dalam implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka peningkatan rumah layak huni di Desa Gunungmasigit Kabupaten Bandung Barat ?

3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka peningkatan rumah layak huni di Desa Gunungmasigit Kabupaten Bandung Barat.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka peningkatan rumah layak huni di Desa Gunungmasigit Kabupaten Bandung Barat.
- 3) Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dalam rangka peningkatan rumah layak huni di Desa Gunungmasigit Kabupaten Bandung Barat.

4. Metode dan pendekatan penelitian

Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk secara sistematis dan detail menggambarkan atau menjelaskan kondisi, fitur, atau fenomena yang sedang diteliti. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang subjek penelitian tanpa mengubah variabel yang diteliti. Dalam situasi ini, peneliti berfungsi sebagai alat utama untuk mengamati dan menjelaskan informasi lapangan secara objektif dan mendalam.⁶

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif agar memperoleh gambaran seutuhnya mengenai satu fenomena yang akan diteliti, penelitian deskriptif kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang sistematis.

Sebelum memulai penelitian, pemilihan pendekatan penelitian sangat penting. Penelitian harus sesuai dengan tujuan dan keuntungan dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah. Pendekatan penelitian membantu peneliti memilih jenis data apa yang perlu mereka kumpulkan dan memilih metode pengumpulan data yang paling sesuai untuk tujuan dan keuntungan penelitian.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh

pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Gunungmasigit. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah makna, proses, serta interaksi sosial yang terjadi selama implementasi program, khususnya dari perspektif para pelaku dan penerima manfaat secara langsung.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini tidak ditujukan untuk mengukur efektivitas program secara kuantitatif, melainkan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana program dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta persepsi masyarakat terhadap dampak program tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Subakti pendekatan kualitatif memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu:

- a. Menekankan pemahaman atas makna dan interpretasi, bukan pada angka atau statistik;
- b. Mengutamakan konteks sosial dan budaya, seperti kebiasaan gotong royong dan dinamika masyarakat desa;
- c. Berbasis pada subjektivitas partisipan, yakni mendengarkan langsung pandangan dari pihak desa, fasilitator lapangan, dan penerima bantuan;
- d. Menggunakan analisis data secara induktif, yaitu membangun pemahaman berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, bukan berdasarkan teori yang sudah ada;
- e. Memperhatikan reflektivitas peneliti, yakni menyadari bahwa latar belakang dan pandangan peneliti dapat memengaruhi proses penelitian;
- f. Menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi dari kegiatan implementasi BSPS;
- g. Menjaga keabsahan data melalui triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber (pemerintah desa, KSM, dan warga penerima).⁸

Pendekatan ini bersifat naturalistik, karena penelitian dilakukan langsung di lokasi program, bukan dalam setting laboratorium. Tujuannya bukan untuk membuat generalisasi luas, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai pelaksanaan program BSPS di satu wilayah tertentu, yaitu Desa Gunungmasigit.

Selain itu, pendekatan ini juga dibangun di atas landasan filosofis berupa:

- a. Ontologi: realitas sosial masyarakat desa dipahami sebagai sesuatu yang dibentuk oleh pengalaman mereka sendiri terhadap program BSPS.
- b. Epistemologi: pengetahuan diperoleh melalui interaksi langsung peneliti dengan masyarakat dan para pelaksana program.
- c. Aksiologi: nilai dan kepedulian peneliti terhadap kondisi sosial masyarakat menjadi bagian dari proses penelitian.
- d. Metodologi: bersifat fleksibel dan responsif terhadap temuan lapangan, sehingga dapat menyesuaikan fokus penelitian jika ditemukan dinamika baru.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di Desa Gunungmasigit menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada dasarnya berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proses implementasi diawali dengan tahapan pendataan serta verifikasi calon penerima bantuan, di mana pihak desa bersama tenaga fasilitator lapangan melakukan pengecekan kondisi rumah masyarakat untuk memastikan apakah layak masuk kategori penerima. Setelah itu, dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai wadah koordinasi antarwarga penerima bantuan sekaligus sarana untuk mengatur pelaksanaan teknis di lapangan. Tahapan berikutnya adalah penyaluran dana stimulan serta realisasi pembangunan atau perbaikan rumah, yang dalam praktiknya selalu melibatkan masyarakat penerima secara langsung. Penerima bantuan tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang aktif, baik melalui partisipasi tenaga dalam kegiatan gotong royong maupun dengan memberikan tambahan dana pribadi untuk menutupi kekurangan biaya yang tidak tercover oleh bantuan stimulan.

Program BSPS terbukti memberikan dampak positif yang cukup besar terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat Desa Gunungmasigit. Rumah-rumah yang sebelumnya dalam kondisi rusak, tidak layak, dan berisiko terhadap kesehatan maupun keselamatan

penghuni berhasil diperbaiki menjadi lebih layak, sehat, dan nyaman untuk ditempati. Selain memberikan manfaat fisik berupa perbaikan kualitas bangunan, program ini juga mendorong terciptanya nilai-nilai sosial di tengah masyarakat. Pelibatan gotong royong dalam pembangunan rumah menumbuhkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial antarwarga. Dengan adanya interaksi dan kerja sama kolektif, masyarakat tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa BPS memiliki dimensi ganda, yaitu manfaat material berupa peningkatan kualitas fisik rumah, sekaligus manfaat sosial berupa penguatan ikatan sosial masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi BPS di Desa Gunungmasigit tidak terlepas dari berbagai kendala yang menghambat jalannya program. Kendala utama terletak pada besaran dana stimulan yang diberikan, yaitu sekitar Rp18 juta per rumah, yang pada kenyataannya belum mampu menutupi keseluruhan biaya pembangunan maupun renovasi rumah. Akibatnya, penerima bantuan masih harus menambah biaya secara mandiri, baik dengan tabungan, pinjaman keluarga, maupun berutang kepada pihak lain. Kendala berikutnya adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme program, khususnya dalam hal prosedur administrasi, pencairan dana, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kondisi ini menimbulkan keterlambatan serta kebingungan dalam proses pelaksanaan. Di samping itu, koordinasi antara pemerintah desa, KSM, dan fasilitator lapangan juga belum sepenuhnya berjalan optimal. Kurangnya komunikasi yang intens dan sistematis menyebabkan munculnya hambatan, seperti keterlambatan penyaluran bantuan maupun pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Untuk menekan berbagai kendala tersebut, sejumlah langkah strategis dilakukan oleh pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan terkait. Salah satunya adalah memperkuat intensitas sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya sebatas pemberitahuan teknis, tetapi juga mencakup penjelasan detail mengenai tujuan, prosedur, serta manfaat program agar masyarakat lebih memahami dan mampu terlibat secara aktif. Fasilitator juga berperan penting dengan memberikan pendampingan intensif sejak tahap perencanaan, pembelian material, hingga proses pembangunan, sehingga warga tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan program. Selain itu, peran serta masyarakat terus diperkuat melalui kerja gotong royong, yang terbukti efektif dalam menekan beban biaya tenaga kerja dan memperlancar proses pembangunan rumah. Pendekatan berbasis partisipasi aktif masyarakat ini tidak hanya menyelesaikan hambatan teknis, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama atas keberhasilan program.

Dengan adanya strategi perbaikan tersebut, pelaksanaan BPS di Desa Gunungmasigit menjadi lebih efektif, baik dari segi kualitas hasil pembangunan rumah maupun dalam memperkuat partisipasi sosial masyarakat. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama secara berkelanjutan.

B. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) di Desa Gunungmasigit Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa program ini secara umum telah memberikan dampak positif, meskipun dalam praktiknya masih dijumpai berbagai hambatan yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, BPS terbukti berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah-rumah yang semula tidak layak huni, baik karena kondisi bangunan yang rapuh maupun keterbatasan sarana dasar, kini mengalami perbaikan sehingga lebih memenuhi standar rumah layak. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya kenyamanan, rasa aman, serta kesehatan penghuni. Selain itu, program juga memperkuat nilai sosial di masyarakat, terutama semangat gotong royong dalam proses pembangunan.

Kedua, meskipun hasilnya cukup signifikan, implementasi program masih menghadapi kendala, antara lain terbatasnya dana stimulan yang hanya berfungsi sebagai pemicu sehingga penerima harus menanggung biaya tambahan. Selain itu, keterlambatan pencairan dana dan rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme teknis juga menjadi hambatan. Kondisi ini menyebabkan pembangunan tidak selalu berjalan sesuai jadwal dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.

Ketiga, keberhasilan program tetap dapat diwujudkan berkat adanya pendampingan fasilitator, peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta kontribusi swadaya penerima bantuan. Sinergi antara pemerintah, pendamping, dan masyarakat inilah yang memastikan program tetap berjalan dan memberi manfaat nyata. Walaupun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, BSPS memiliki potensi besar sebagai instrumen perbaikan kondisi hunian sekaligus penguatan kehidupan sosial masyarakat di Desa Gunungmasigit.

2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun pihak terkait dalam penyempurnaan pelaksanaan Program BSPS, baik di Desa Gunungmasigit maupun di daerah lain dengan kondisi serupa.

1. Peningkatan sosialisasi dan pendampingan. Pemerintah desa bersama fasilitator perlu memperluas cakupan sosialisasi dengan metode yang lebih komunikatif agar masyarakat memahami prosedur program, termasuk pengelolaan dana dan pelaporan. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan bantuan.
2. Peninjauan besaran dana stimulan serta mekanisme pencairan. Jumlah bantuan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan agar tidak terlalu membebani penerima. Selain itu, pencairan dana perlu dilakukan tepat waktu dengan prosedur yang lebih sederhana untuk menghindari terhambatnya pembangunan.
3. Penguatan monitoring dan evaluasi. Pengawasan program harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, fasilitator, KSM, serta masyarakat penerima bantuan. Evaluasi rutin juga diperlukan untuk mendeteksi masalah sejak dini sehingga program dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Secara umum, BSPS diharapkan tidak hanya berfokus pada penyediaan rumah layak huni secara fisik, tetapi juga mampu menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, KSM, dan masyarakat, program ini berpotensi memberikan kontribusi yang lebih luas bagi peningkatan kualitas hidup, penguatan ekonomi lokal, serta pembangunan sosial yang berkesinambungan di Desa Gunungmasigit maupun wilayah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, F. 2023. Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Langkat. *Publika* 11(4): 4.
- Babuta, A.I. dan Rahmat, A. 2019. Peningkatan kompetensi pedagogik guru melalui pelaksanaan supervisi klinis dengan teknik kelompok. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3(1): 2. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i1.496>
- Basri, M., dkk. 2024. Analisis implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 10(4): 97.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri. Hlm 6.
- Creswell, J.W. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 20.
- Desyra, T.E., Dengo, S., dan Londa, V.Y. 2021. Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penyediaan rumah layak huni di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *JAP: Unsrat* 7(110): 35.
- Dunn, W.N. 2018. *Public Policy Analysis*. New York: Routledge. Hlm 13.
- Dwiyanto, I. 2019. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. Hlm 3.
- Ibadi, R.M.W. 2024. Diskursus metodologi penelitian. *Jurnal Trave* XXVIII(1): 14.
- Nugroho, R. 2017. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hlm 6.

- Pahleviannur, A., dkk. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. Hlm 17.
- Parsons, W. 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana. Hlm 15.
- Sinaga, R.S. 2013. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 4.
- Subarsono, A.G. 2015. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 11.
- Syakhirul, A., Wahab, S.O.M., Aziz, F., Romadhon, S., Marganingsih, A., Mansur, E.M.R., dkk. 2022. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi. Jakarta: Gaptek.id. hlm 34.
- Wahab, S. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 5.
- Wahdania, M., Roekminiati, S., dan Sunarya, A. 2024. Analisis pengelolaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Flores Timur (studi pada Desa Sagu, Kecamatan Adonara). *Jurnal Administrasi Publik* 2(2): 399.